

Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Nasional

Prof. Dr. H. Soedijarto, MA *)

Abstrak

Sejak Indonesia merdeka, telah beberapa kali terjadi perubahan kurikulum sekolah dasar dan menengah. Perubahan itu dapat menimbulkan berbagai pertanyaan mengingat betapa penting dan strategisnya peranan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pengajaran nasional, tulisan ini membahas (1) makna kurikulum sebagai unsur strategis dalam pendidikan sekolah; (2) tujuan dan materi kurikulum yang relevan; (3) pendekatan proses pembelajaran dan implikasinya terhadap sistem evaluasi; (4) evaluasi sebagai media pendidikan dan sarana umpan balik; dan (5) peranan guru dan implikasinya terhadap profesionalisasi jabatan guru. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa apabila sekolah dengan kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan secara relevan, efisien dan efektif akan mampu mendukung terlaksananya fungsi pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional.

Kata kunci: Kurikulum, pilar belajar, dan sistem evaluasi

Abstract

There have been several changes in the primary and secondary school curriculum system ever since Indonesia gained its independence. The changes could raise several questions due to the important and strategic role of the curriculum in achieving the objective of national education system. This article discusses several issues related to the national instructional system, particularly about (1) the role of curriculum as a strategic means in school education, (2) the relevant objectives and contents of the curriculum, (3) the approaches in learning process and their implication to evaluation system, (4) evaluation as an educational medium as well as a feedback instrument, and (5) teachers'

*) Guru besar Universitas Negeri Jakarta

role and its impact to the professionalism of education personnel. This article states, if the design and the implementation are appropriate, relevant, efficient and effective, the school curriculum will be able to support the national education to function in educating the Indonesian people and developing the national culture.

Pendahuluan

Memasuki tahun 2004 ini, sejak Indonesia merdeka, kita telah mengenal berbagai kurikulum, ada kurikulum 1947, kurikulum tahun 1950-an, kurikulum tahun 1964, kurikulum tahun 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Mengapa kurikulum yang satu diganti dengan kurikulum yang lainnya. Sampai dengan kurikulum 1984, perubahan kurikulum banyak yang dipengaruhi oleh perubahan politik. Kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL-USDEK, kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, dan kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kurikulum 1994, di samping meniadakan mata pelajaran PSPB juga diperkenalkannya sistem kurikulum SMU yang dimaksudkan untuk menjadikan pendidikan umum benar-benar sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi.

Dari serangkaian perubahan kurikulum, yang didasarkan atas hasil penilaian nasional pendidikan (*national assessment*) hanyalah kurikulum 1975 dan kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (1974–1981). Selebihnya merupakan perubahan yang didasarkan atas asumsi teoretik, bukan atas dasar temuan-temuan hasil evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Karena itu **kita sukar untuk menjawab pertanyaan** "Seberapa jauh kurikulum 1975, 1984, 1994 telah, belum atau tidak berhasil mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan?" Sesungguhnya pada tahun 1981 Balitbang Depdikbud telah selesai (dimulai tahun 1978) melakukan studi evaluasi kurikulum secara nasional yang komprehensif dengan datanya terkumpul dalam 6 (enam) disket komputer. Tetapi penggantian kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 sama sekali tidak didasarkan atas hasil evaluasi tersebut. Bahkan data yang terkumpul dari hasil penelitian *evaluatif* yang berlangsung dari tahun 1978 sampai tahun 1980-pun tidak sempat diolah lebih lanjut. Memang tradisi penelitian dan pengembangan yang dirintis oleh almarhum Menteri Mashuri dan diperkuat oleh Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro nampaknya berhenti sejak Menteri Nugroho Notosusanto. Dalam konteks praktek perubahan kurikulum yang demikian, tulisan ini tidak berpretensi berangkat dari hasil evaluasi ilmiah melainkan berangkat dari *premise teoretik*. Atas dasar pertimbangan di atas, tulisan ini akan mencoba membahas : (1) makna kurikulum sebagai unsur yang strategis dalam pendidikan sekolah; (2) tujuan dan materi kurikulum

yang bermakna bagi kedudukan kurikulum yang strategis; (3) pendekatan dan proses pembelajaran yang relevan; (4) evaluasi sebagai media pendidikan dan instrumen umpan balik; dan (5) peranan guru dan implikasinya terhadap profesionalisasi tenaga kependidikan.

Makna Kurikulum sebagai Unsur yang Strategis dalam Pendidikan Sekolah

Sekolah adalah lembaga sosial yang keberadaannya sebagai bagian dari sistem sosial negara bangsa sangat strategis sejak industrialisasi dan **gerakan negara kebangsaan** pada abad ke-19, yang melahirkan negara-negara kebangsaan seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Perancis, Italia, maupun Jepang. Para pendiri Republik nampaknya terilhami oleh perkembangan negara-negara kebangsaan tersebut yang, dalam sejarahnya merupakan proses menjadi satunya kerajaan-kerajaan kecil dari masing-masing negara tersebut, mengamanatkan perlunya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional melalui diselenggarakannya **satu sistem pengajaran nasional** (sekolah). Para pendiri Republik sadar akan adanya jurang antara kondisi yang dicita-citakan yaitu masyarakat negara kebangsaan yang moderen dan demokratis yang berdasarkan Pancasila dengan kondisi perkembangan masyarakat Indonesia pada saat proklamasi. Karena itu harapan terbesar dari suatu masyarakat yang melakukan transformasi budaya adalah menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap dari warga masyarakat moderen. Dalam mengemban peranan sekolah sebagai pusat pembudayaan inilah kedudukan kurikulum sangatlah strategis. Karena proses pembudayaan berbagai kemampuan nilai, dan sikap itu hanya dapat berlangsung melalui proses pembelajaran yang bermakna sebagai proses pembudayaan. Proses pembelajaran yang demikian hanya akan terjadi secara efisien, dan efektif melalui **suatu sistem kurikulum yang dirancang secara sistematis sejak penentuan tujuan yang harus dicapai, materi yang harus dipelajari, proses pembelajaran yang harus diterapkan, dan sistem evaluasi yang harus dikembangkan dan dilaksanakan.**

Kalau kita cermati, tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, baik UU No. 4 Tahun 1950, jo UU No. 12 Tahun 1954, yang mencitakan manusia terdidik Indonesia sebagai "manusia susila yang cakap dan demokratis serta bertanggung jawab", atau UU No. 2 Tahun 1989 yang mencitakan wujud manusia Indonesia terdidik sebagai "manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan", dan yang terakhir UU No. 20 Tahun 2003 yang mencitakan "manusia yang beriman, bertaqwa dan

berakhlak mulia, dan seterusnya”, kesemuanya mencitakan wujud sosok manusia yang ideal. Ketercapaiannya tidak mungkin tanpa suatu proses yang terencana, terprogram, dan terlaksana dengan efisien, efektif, dan relevan. Tetapi pada umumnya tujuan pendidikan yang demikian ideal selama ini tidak pernah dengan sungguh-sungguh diterjemahkan secara operasional dan diupayakan ketercapaiannya. Bahkan banyak sementara orang (termasuk para pejabat atau pakar) yang memandang hal tersebut tidak mungkin dapat dicapai oleh sekolah. Mereka ini adalah kaum realis, dalam pengertian kalau penyelenggaraan pendidikan disekolah dengan kondisi seperti yang berlangsung sampai dengan hari ini, dalam pengertian rendahnya kesungguhan dan kemampuan guru, serta terbatasnya, bahkan tanpa fasilitas serta sarana dan prasarana yang diperlukan, dengan pengertian waktu yang terbatas, dalam pengertian model pembelajaran yang tidak lebih dari mendengar, mencatat, dan menghafal dengan evaluasi hanya mengukur kemampuan mengingat apa yang telah dipelajari dengan keterbatasan buku bacaan baik untuk guru dan murid. Kalau tetap demikian memang segala tujuan itu tidak akan dapat dicapai. Kalau demikian sesungguhnya tidak perlu kita mengubah kurikulum bahkan tidak perlu mengubah UU Sisdiknas, karena semuanya tidak dengan sendirinya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Tulisan ini memandang kalau sikap ini yang tetap berada di benak semua lapisan masyarakat Indonesia dari elit politik, pakar, sampai guru dan orang tua murid, sesungguhnya mengharapkan pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa sangat berlebihan karena tidak akan dapat terlaksana.

Tulisan ini berpandangan bahwa sekolah dengan kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan secara relevan, efisien dan efektif akan mampu mendukung terlaksananya fungsi pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional.

Tujuan dan Materi Kurikulum yang Relevan

Tujuan

Kalau kita kaji secara mendalam tujuan pendidikan yang selama ini dirumuskan, dalam berbagai UU pendidikan nasional kita, akan menemukan betapa pendidikan nasional diharapkan untuk dapat melahirkan manusia Indonesia yang :

- (1) religius dan bermoral;
- (2) yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan;
- (3) yang sehat jasmani dan rohani;
- (4) yang berkepribadian dan bertanggung jawab

Keempat karakteristik manusia yang dirumuskan dalam berbagai Undang-Undang Pendidikan Nasional tersebut hakekatnya karakteristik yang bersifat universal, yang masih perlu diterjemahkan kedalam rumusan yang operasional dan terkait dengan perkembangan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. Wujud nyata dari setiap karakteristik tersebut akan berbeda dalam suatu tingkat perkembangan masyarakat dan tingkat pendidikan. Karena itu dalam menterjemahkan keempat karakteristik tersebut kedalam rumusan wujud kemampuan, nilai, dan sikap yang dapat dijadikan rujukan dalam proses perencanaan kurikulum perlu dipahami tingkat dan arah perkembangan masyarakat Indonesia.

Hampir tidak ada seorangpun yang dapat mengelakkan diri dari kenyataan bahwa Indonesia di millenium ketiga ini berada dalam era globalisasi. Yang maknanya adalah berlakunya berbagai ukuran dan aturan internasional dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan tehnologi, komunikasi/transportasi bahkan kehidupan keagamaan. Dalam era semacam ini hanya **bangsa yang berkualitas sumber daya manusianya, yang dalam bidang ekonomi** ditunjukkan dengan kemampuannya dalam : (1) mengolah dan mengelola sumber daya alam, (2) pengembangan teknologi, (3) menghasilkan komoditas yang bermutu dan dapat bersaing di pasar dunia, (4) mengelola modal; dan (5) mengelola perdagangan (Harbison-Myers), yang dapat bertahan dan secara berkesinambungan maju. **Dalam bidang politik**, hanya bangsa yang sistem politik demokrasinya mantap yang mampu bertahan dan terus maju. **Dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi**, hanya bangsa yang memiliki infrastruktur teknologi unggul yang dapat bertahan, bersaing dan terus maju. Dari ulasan singkat di atas dapatlah kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwa di tengah era globalisasi dengan segenap tantangan dan kesempatan yang terbuka, agar negara bangsa Indonesia dapat bertahan sebagai negara yang merdeka dan bermartabat diperlukan manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu mendukung :

- (1) sistem politik demokrasi yang stabil berdasarkan Pancasila;
- (2) sistem ekonomi nasional yang mantap infrastruktur fisiknya, infrastruktur teknologinya, infrastruktur tenaga manusianya, berkembang wirausahanya dan tumbuh pengusaha kecilnya;
- (3) sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang tangguh;
- (4) majunya kebudayaan dalam berbagai seginya baik kesenian, kesusastraan, maupun dimensi kognitif dan normatif dari kebudayaan nasional; dan
- (5) mantapnya etika sosialnya.

Berangkat dari pemahaman tentang karakteristik masyarakat moderen di era globalisasi yang perlu kita wujudkan di Indonesia dapatlah kiranya kita

sampai kepada identifikasi kemampuan, nilai dan sikap yang perlu dikuasai dan dimiliki manusia terdidik Indonesia yaitu :

- (1) memiliki kemampuan, nilai dan sikap yang memungkinkannya berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik;
- (2) memiliki kemampuan, etos kerja, dan disiplin kerja yang memungkinkannya dapat secara aktif dan produktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi,
- (3) memiliki kemampuan dan sikap ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kemampuan penelitian dan pengembangan,
- (4) memiliki kepribadian yang mantap, berkarakter dan bermoral, serta berakhlak mulia.

Materi yang Relevan

Setelah teridentifikasi empat gugus kemampuan, nilai dan sikap yang terkait dengan kepentingan terwujudnya masyarakat Indonesia moderen dan bermartabat di era globalisasi, pertanyaannya adalah "Materi pendidikan manakah yang harus dijadikan obyek belajar ?"

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 maupun UU No. 20 tahun 2003 telah memberikan jawaban seperti yang dikutip dibawah ini.

Menurut UU No. 2 th. 1989 (Pendidikan Dasar) a. Pendidikan Pancasila b. Pendidikan Agama c. Pendidikan Kewarganegaraan d. Bahasa Indonesia e. Membaca dan Menulis f. Matematika, termasuk berhitung g. Pengantar Sains dan Teknologi h. Ilmu Bumi i. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum j. Kerajinan Tangan dan Kesenian k. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan l. Menggambar m. Bahasa Inggris	Menurut UU No. 20 Thn 2003 (Sampai Sekolah Menengah) a. Pendidikan Agama b. Pendidikan Kewarganegaraan c. Bahasa d. Matematika e. Ilmu Pengetahuan Alam f. Ilmu Pengetahuan Sosial g. Seni, Budaya, dan Olah raga; serta h. Keterampilan, Kesenian dan Muatan Lokal
---	--

Kedua ketentuan yang terdapat dalam UU No. 2 tentang SISDIKNAS dan UU SISDIKNAS (2003) nampaknya berbeda, tetapi hakekatnya yang perlu

dipertanyakan adalah mengapa mata pelajaran tersebut yang ditentukan, misalnya kalau dalam UU SISDIKNAS tahun 2003 Seni, Budaya dan Olah Raga dalam satu gugus, apa bedanya dengan dipisahkannya menggambar dan kesenian pada UU No. 2 th. 1989. Demikian juga dengan IPS dalam UU SISDIKNAS tahun 2003 dengan Ilmu Bumi, Sejarah pada UU No. 2 Th. 1989. Pertanyaannya adalah apakah benar mata pelajaran tersebut menunjang tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Dalam menjawab pertanyaan tentang mengapa suatu bahan kajian dan suatu pendekatan ditempuh, Philip Phenix dari pengamatannya terhadap perkembangan peradaban dan **memandang perlunya generasi muda siap untuk melanjutkan perkembangan peradaban tersebut**. Dalam kaitan ini, Philip Phenix menyatakan :

*"The richness of culture and the level of understanding achieve in advanced civilization are due almost entirely to the labours of individual men of genius and organized communities of specialists. A high level of civilization is the consequence of the dedicated service of person in the special gifts for the benefits of all. Every person is indebted for what he has to a great network of skilled inventors, experimenters, artists, seers, scholars, prophets, and saints, who have devoted their special talents to the well being of all."*¹

Berangkat dari pemahamannya tentang hakekat perkembangan peradaban Philip Phenix mengidentifikasi enam wilayah yang bermakna untuk menjadikan peserta didik memahami makna dunia yang dimana mereka hidup dan mengembangkan dirinya. Keenam wilayah makna tersebut yaitu : *Symbolics, Empirics, Esthetics, Synnoetics, Ethics, dan Synoptics (Realms of Meaning)*, yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut :

"The first realm, Symbolics, comprises ordinary language, Mathematics, and various types of nondiscursive symbolic forms such as gesture, rituals, rhythmic patterns, and the like. These meaning are contained in arbitrary symbolic structures, with socially accepted rules of formation and transformation created as instrument for the expression and communication of any meaning whatsoever.

The second realm, Empirics, includes the science of the physical world of living things, and of man. These science provide factual descriptions, generalizations, and theoretical formulation and experimentation in the world of the matter, life, mind, and society. The third realm, Esthetics, contains the various arts, such as music, the visual arts, the arts of the movement, and literature. Meaning in this realm are concerned with the contemplative perception of particular significant things as unique objectifications of ideated subjectivities.

The fourth realm, Synnoetics, embraces what Michael Polanyi calls "personal knowledge" and Martin Buber the "I-Thou" relation. The novel term "synnoetics", which was devised because no existing concept appeared adequate to the type of understanding intended, derives from the Greek *synnoesis*, meaning "meditative thought", and this in turn is compounded of *syn*, meaning "with" or "together" and *noesis*, meaning "cognition". Thus synnoetics signifies "relational insight" or "direct awareness".

The fifth realm, Ethics, includes moral meaning that express obligation rather than fact, perceptual form, or **awareness of relation**. In contrast to the sciences, which are concerned with abstract cognitive understanding, to the arts, which express idealized **esthetic perceptions**, and to personal knowledge, which reflect intersubjective understanding, **morality has to do with personal conduct that is based on free, responsible, deliberate decision**.

The sixth realm, Synoptics, refers to meanings that are comprehensively integrative. It include history, religion, and philosophy. These discipline combine empirical, esthetic, and synnoetic meanings into coherent whole.²⁾

Disadari bahwa kandungan pengetahuan yang terdapat didalam setiap wilayah dan sub wilayah demikian luas, karena itu pendidikan perlu memilih yang essensial. Kiranya kita sepakat bahwa setiap disiplin atau dalam bahasanya Phenix setiap "*Realms of Meaning*" **mengandung kekhususan dalam metode, struktur ilmu pengetahuan yang luas, dan konsep-konsep dasar yang menonjol**. Karena itu Philip Phenix, dan para pembaharu pendidikan yang mengakhiri gerakan pendidikan *progressive* di Amerika Serikat seperti Jerome Bruner, yang hakekatnya merupakan penerus Alford North Whitehead mengutamakan pemilihan bahan pelajaran secara ketat agar para pelajar dapat mempelajari sesuatu sampai tingkatan memahami makna yang dipelajari bagi kehidupannya.

Penulis mengartikan bahwa pemikir seperti Philip Phenix dan J. Bruner hakekatnya menghidupkan pemikiran Whitehead pada tahun 1920-an.

Berangkat dari pemikiran ini Philip Phenix selanjutnya mengemukakan empat prinsip dasar dalam memilih media pelajaran dari setiap wilayah arti, yaitu :

- a. bahan pelajaran harus diambil dari "*disciplined of inquiry*;
- b. bahan pelajaran harus dipilih konsep-konsep utama suatu disiplin yang mewakili hakekat disiplin tersebut;
- c. bahan pelajaran mengutamakan "*method of inquiry*"; dan
- d. bahan pelajaran harus dapat mendorong peserta didik berpikir secara imajinatif

Pendekatan pemilihan bahan ini jelas berbeda dari pendekatan Paul Freire yang menyerahkan pemilihan bahan kepada peserta didik, suatu pandangan yang sedang dipopulerkan oleh sementara pakar. Padahal pandangan Freire dan Ivan Hlich hakekatnya berangkat dari pandangan kaum nihilis yang mencitakan adanya "*Stateless Society*"; suatu aliran pemikiran dalam pendidikan yang sering muncul dalam perjalanan sejarah pemikiran pendidikan tetapi selama ini belum mampu mengubah kenyataan pendidikan dalam masyarakat moderen dan *post moderen* dalam masyarakat demokratis yang selalu memerlukan suatu tatanan hidup bernegara dengan segala persyaratannya.

Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh perancang UU SISDIKNAS 2003 telah secara mendalam mempelajari kedudukan SISDIKNAS dalam proses pembangunan negara bangsa moderen Indonesia sebelum merumuskan pokok-pokok pikiran yang mendasar tentang sistem pendidikan nasional.

Sesungguhnya penulis berpandangan bahwa UU no. 2 th 1989 masih relevan untuk menjadikan sistem pendidikan nasional dapat berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Masalahnya terutama disebabkan karena berbagai ketentuan sebagai yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) tentang fungsi dan tujuan pendidikan dasar dan pasal 15 ayat (1) tentang fungsi dan tujuan pendidikan menengah dan pasal 16 ayat (1) tentang fungsi dan tujuan pendidikan tinggi, tidak diupayakan untuk dapat terwujud. Proses pembelajaran yang terjadi dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi pada umumnya masih proses penyajian informasi oleh pengajar untuk dicatat oleh peserta didik, suatu model pembelajaran yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 2 th 1989. Adalah keyakinan profesional dan akademik saya bahwa tanpa proses pembelajaran yang bermakna sebagai proses pembudayaan, tujuan dan struktur kurikulum yang telah dirancang dengan baikpun tidak akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Pendekatan Proses Pembelajaran dan Implikasinya terhadap Sistem Evaluasi

Pendekatan Proses Pembelajaran

Bagian ini bermaksud mencoba menjawab pertanyaan "model pembelajaran seperti apa yang dapat bermakna sebagai proses pembudayaan?" Pandangan kami adalah bahwa bila proses pembelajaran dapat merangsang, menantang dan menyenangkan seperti yang dikemukakan oleh Whitehead sampai pada tingkat "*joy of discovery*" diharapkan proses pembelajaran itu akan bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini UNESCO melalui International Commission on Education for The Twenty First Century ³⁾ yang antara

lain bertujuan untuk mengubah dunia *"from technologically divided world where high technology is privilege of the few to technologically united world"* mengusulkan empat pilar belajar yaitu *"learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together"*.

Menerapkan empat pilar tersebut berarti bahwa proses pembelajaran memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat menemukan dirinya. Model pembelajaran seperti ini hanya dapat berlangsung dengan tenaga guru yang penuh konsentrasi, peralatan yang memadai, dengan materi yang terpilih dan waktu yang cukup tanpa harus mengejar target untuk ujian nasional. Ujian nasional akan mengurangi kreatifitas belajar sampai tingkatan *"joy of discovery"*.

Untuk jelasnya **keempat pilar belajar akan diuraikan secara lebih rinci**. *"Learning to know", "learning to do", "learning to live together" dan "learning to be"*, empat pilar belajar yang oleh UNESCO dipandang sebagai pendekatan belajar yang perlu diterapkan untuk menyiapkan generasi muda memasuki abad ke-21 hakekatnya merupakan pendekatan belajar yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh pemikir pendidikan sejak permulaan abad ke-20. Pendekatan ini demikian berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, terutama sejak ketertinggalan Amerika Serikat dalam teknologi ruang angkasa Uni Soviet pada tahun 1957. Pemikir pendidikan seperti Whitehead (1916) memandang pendidikan sebagai *"acquisition of the art of the utilization of knowledge"*⁴⁾. Karena itu dia sampai menyatakan bahwa orang yang paling banyak pengetahuannya adalah orang yang tidak berguna di bumi Tuhan yang dalam bahasa aslinya tertulis sebagai berikut : *"A merely well informed man is the most useless bore on God's earth"*⁵⁾ Selanjutnya dalam ceramahnya pada himpunan Matematika pada tahun 1916 dia menekankan agar peserta didik sejak dini harus sudah dapat menikmati proses penemuan. Kalimat lengkapnya tertulis sebagai berikut:

*"Let the main ideas which are introduced into a child's education be few and important, and let them be thrown into every combination possible. The child should made them his own, and should understand their application here and now in the circumstance of his actual life. From the very beginning of his education, the child should experience the joy of discovery"*⁶⁾.

Kritik yang dia tujukan ke praktek pendidikan di Inggris pada permulaan abad ke-20 ini menjadi landasan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat pasca Sputnik.

Selanjutnya muncul pemikir-pemikir pendidikan di Amerika Serikat seperti Philip Phenix, Jerome Bruner, dan Israel Sheffler, Philip Phenix misalnya mengatakan:

"It is more important for the student to become skillful in the ways of knowing than to learn about any particular product of investigation. Knowledge of methods makes it possible for a person to continue learning and undertake inquiries on his own"⁷⁾

Gerakan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat yang juga mempengaruhi negara-negara Eropa Barat telah membuahkan kemajuan IPTEK yang berpengaruh kepada perkembangan negara-negara Barat. Memasuki akhir abad ke-20, dalam dunia yang makin menjadi menggloabal, perbedaan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang makin melebar. Sadar akan hal ini UNESCO membentuk suatu komisi International yang tujuannya memberikan rekomendasi kepada UNESCO untuk menerapkan empat pilar belajar.

Dua kutipan dari laporan Komisi Internasional berikut menunjukkan situasi paradoksal yang dihadapi negara berkembang.

"The need for change from narrow nationalism to universalism, from ethnic and cultural prejudice to tolerance, understanding and pluralism, from autocracy to democracy in its various manifestations, and from technologically united world, places enormous responsibilities on teacher who participate in the moulding of the characters and minds of the new generation"⁸⁾

Demikian tingginya tuntutan terhadap peranan yang diharapkan dari pendidikan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

Tetapi untuk melaksanakan peranan ini, kondisi pendidikan di negara berkembang pada umumnya (termasuk Indonesia) dilukiskan oleh seorang anggota Komisi tersebut In'am Al Mufti dalam artikelnya

"Excellence in Education : investing in human talent" dalam:

"in the past two decades in particular, governments and international agencies in the developing world sought to respond to development challenges by focusing increasingly on expanding educational opportunities. This drive by developing countries was in fulfilment of UNESCO's mission to achieve 'Education for All'. But the expansion in education was concentrated on coping with growing demand for schooling, while the quality of education itself was not given priority."⁹⁾

Akibat dari perkembangan ini yang terjadi adalah sekolah yang berjubel, dengan guru yang secara profesional kurang memenuhi syarat, proses pembelajaran tidak lebih dari mencatat, menghafal, dan mengingat kembali yang berdampak tidak adanya kesempatan menerapkan pendekatan moderen

dalam proses pembelajaran. Mufti yakin bahwa tiadanya kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu akan merugikan masyarakat karena sukar memperoleh sumber daya manusia yang bermutu untuk pembangunan masyarakat.

Dalam kalimat aslinya dia menyatakan:

*"Notwithstanding the good intentions of traditional policies, to deprive outstanding students of appropriate educational opportunities is to deprive society of the best human resources that lead towards real and effective development."*¹⁰⁾

Dengan latar belakang inilah, yaitu ketertinggalan negara berkembang dari negara maju dalam penguasaan IPTEK yang melatarbelakangi kemajuan ilmu dan stabilnya sistem politik demokrasi dan tiadanya dukungan bagi pemerataan pendidikan, UNESCO memperkenalkan empat pilar belajar, yaitu: *'Learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be.'*

Learning to Know

Seperti telah dikemukakan oleh Philip Phenix, proses pembelajaran yang mengutamakan penguasaan *"ways of knowing"* atau *"mode of inquiry"* telah memungkinkan peserta didik untuk terus belajar dan mampu memperoleh pengetahuan baru dan tidak hanya memperoleh pengetahuan hasil penelitian orang lain. Karena itu hakekat dari *"Learning to Know"* adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pelajar/mahasiswa menguasai teknik memperoleh pengetahuan dan bukan semata-mata memperoleh pengetahuan. Dalam bahasan Israel Scheffler pilar ini pada hakekatnya terkait dengan relevansi epistemology, yang mengutamakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik (pelajar/mahasiswa) terlibat dalam proses meneliti dan mengkaji. Dalam kalimat lengkapnya tertulis sebagai berikut:

*"Epistemological relevance in short requires us to reject both myth and mystic union. It requires not contact but criticism, not immersion in the phenomenal and conceptual given, but the flexibility of mind capable of transcending, reordering, and expanding the given. "An education that fosters criticism and conceptual flexibility transcends its environment and by erecting a mythical substitute for this world but rather striving for a systematic and penetrating comprehension of it."*¹¹⁾

Selanjutnya dia menguraikan pengkajian dalam kalimat berikut:

"Theoretical inquiry, independently pursued has the most powerful potential for the analysis and transformation of practice. The bearing of inquiry upon practice is moreover of the greatest educational interest. Such interest is not, contrary to recent emphases, exhausted in a concern for inquiry within

the structure of several disciplines. Students should be encouraged to employ the information and technique of disciplines in analysis, criticism, and alteration of their practical outlook. Habits of practical diagnosis, critique and execution upon responsible inquiry need the supplement theoretical attitude and disciplinary proficiencies in the training of the young."¹²⁾

Sengaja penulis mengutip pandangan Scheffler demikian panjang karena dari sudut pandang pendidikan tinggi, pandangan Scheffler tentang relevansi pendidikan sangat terkait dengan "learning to know" pada tingkat pendidikan tinggi. Seperti halnya Phenix, Scheffler memandang pentingnya pilar "learning to know" untuk berangkat dari disiplin ilmu pengetahuan karena bagi mereka "mode of inquiry" dari disiplin ilmu adalah bentuk yang paling tertinggi dari berpikir. Dalam kaitan ini dia menyatakan:

*"In the revolutionary perspective, thought is an adaptive instrument for overcoming environmental difficulties. Scientific inquiry, the most highly form of thought is the most explicit problem directed."*¹³⁾

Selanjutnya dia menyatakan:

*"Interpreting science as the most refined and effective development to such adaptive thinking, is urges the outensible problem-solving pattern of scientific research as the chief paradigm of intellectual activity, to be favored in all phases of education and culture."*¹⁴⁾

Dari uraian di atas dan kutipan yang sengaja penulis sajikan dapatlah ditarik pemahaman bahwa penerapan pilar "learning to know" pada tingkat pendidikan tinggi adalah penerapan paradigma penelitian ilmiah dalam pelaksanaan perkuliahan. Suatu model yang penulis alami selama mengikuti kuliah di "University of California". Dengan model pendekatan ini dapatlah dihasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi dan dengan sendirinya akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan.

Learning to Do

Bagaimana dengan pilar kedua "learning to do". Kalau pilar pertama, "learning to know", sasarannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai keseimbangan dalam penguasaan IPTEK antara negara di dunia dan tidak lagi dibagi antara negara utara-selatan, pilar kedua, "learning to do", sasarannya adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. Dalam masyarakat industri atau ekonomi industri tuntutan tidak lagi cukup dengan penguasaan ketrampilan motorik yang kaku melainkan diperlukan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti "controlling, monitoring, maintaining, designing, organizing, yang dengan kemajuan teknologi pekerjaan yang sifatnya fisik telah diganti

dengan mesin. Untuk menyiapkan anggota masyarakat dalam dunia kerja yang dalam "technology knowledge based economy", belajar melakukan sesuatu dalam situasi yang konkrit yang tidak hanya terbatas kepada penguasaan ketrampilan yang mekanistik melainkan meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi konflik, menjadi penting.

Untuk itu penulis berpandangan dalam kaitan dengan pilar kedua yaitu "learning to do" perlu dikaitkan dengan pandangan Scheffler tentang relevansi psikologis, maupun doktrin Whitehead tentang hakekat pendidikan sebagai upaya penguasaan seni menggunakan pengetahuan. Ini berarti pula bahwa untuk melahirkan generasi baru yang "intelligent" dalam bekerja, pengembangan kemampuan memecahkan masalah dan berinovasi sangatlah diperlukan. Dalam kaitan ini, ada baiknya penulis kutipkan pandangan Scheffler tentang relevansi psikologis dalam kalimat berikut:

"Thought according to widely prevalent doctrine is problem oriented. It originates in doubt, conflict, and difficulty. The function is to overcome obstacles to the smooth flow of human activities. When action is coherent and well adapted to its circumstances, human energy is released into overt channel set by habit and custom. The blocking of conduct either through internal conflict or environmental hindrance, turns its energy inward, transforming it into thought."⁵⁾

Dalam kaitan ini dengan pemahaman tentang pilar kedua "learning to do" pada tingkat pendidikan tinggi ini mengandung makna atau berimplikasi tentang perlunya pendidikan profesional pada pendidikan tinggi secara konsekuensif, bermuara pada paradigma pemecahan masalah yang memungkinkan seorang mahasiswa berkesempatan mengintegrasikan pemahaman konsep, penguasaan ketrampilan teknis dan intelektual, untuk memecahkan masalah dan dapat berlanjut kepada inovasi dan improvisasi.

Learning to Live Together

Kemajuan dunia dalam bidang IPTEK dan ekonomi yang mengubah dunia menjadi desa global ternyata tidak menghapus konflik antara manusia yang selalu mewarnai sejarah umat manusia. Yang terjadi akhir-akhir ini bahkan sebaliknya yaitu terjadinya konflik antar manusia yang didasarkan atas prasangka, baik antar ras, antar suku, antar agama dan antar si kaya dan si miskin, dan antar negara. Padahal sejak berakhirnya Perang Dunia ke II berbagai deklarasi untuk menjadi dasar penyelesaian konflik seperti Deklarasi HAM, piagam PBB, dan kita bangsa Indonesia memiliki landasan pandangan hidup Pancasila yang hakekatnya adalah untuk membangun negara kebangsaan yang

demokratis, berkeadilan sosial, ber-Ketuhanan yang Maha Esa, dan menggalang persatuan dan persaudaraan bukan hanya antar warga bangsa melainkan dengan seluruh umat manusia seperti dinyatakan dalam kalimat "ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi". Tetapi kenyataan menunjukkan terjadinya berbagai konflik sosial baik horizontal maupun vertical.

Diakui oleh Komisi Internasional untuk pendidikan abad ke-21 tentang sulitnya menciptakan kerukunan, toleransi dan saling pengertian dan bebas dari prasangka. Dalam pengamatan komisi tersebut sebabnya diuraikan dalam kalimat berikut :

"It is difficult task, since people very naturally tend overvalue their own qualities and those of their group and to harbour prejudices against others. Furthermore, the general climate of competition that is at present characteristic of economic activity, within and above all between nations, tends to give priority to the competitive spirit and individual success. Such competition now amounts to ruthless economic warfare and to a tension between rich and poor that is dividing nations and the world, and exacerbating historic rivalries".¹⁶⁾

Latar belakang kenyataan dalam masyarakat yang digambarkan oleh komisi diatas menuntut pendidikan tidak hanya membekali generasi muda untuk menguasai IPTEK dan kemampuan bekerja serta memecahkan masalah, melainkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, pengertian, dan tanpa prasangka. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk pada saat yang bersamaan setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran bahwa hakekat manusia adalah beragam tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Pendidikan untuk mencapai tingkat kesadaran akan persamaan antar sesama manusia dan terdapat saling ketergantungan satu sama lain tidak dapat ditempuh dengan pendidikan dengan pendekatan tradisional melainkan perlu menciptakan situasi kebersamaan dalam waktu yang relative lama. Dalam hubungan ini, prinsip relevansi sosial dan moral yang disarankan Israel Scheffler sangat memadai. Suatu prinsip yang memerlukan suasana, belajar yang secara "inherently" mengandung nilai-nilai toleransi saling ketergantungan, kerjasama, dan tenggang rasa. Ini diperlukan proses pembelajaran yang menuntut kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan "camping" yang berlangsung mingguan dengan sasaran bersama yang harus dicapai oleh seluruh peserta merupakan salah satu model yang perlu ditempuh. Model sekolah berasrama dan kampus yang merupakan kawasan tersendiri merupakan pendekatan yang ditempuh Inggris dan Amerika Serikat dalam membangun bangsa yang bersatu. Kiranya bangsa Indonesia perlu belajar dari negara lain.

Learning to Be

Tiga pilar yaitu *learning to know*, *learning to do*, dan *learning to live together* ditujukan bagi lahirnya generasi muda yang mampu mencari informasi dan/ atau menemukan ilmu pengetahuan, yang mampu melaksanakan tugas dalam memecahkan masalah, dan mampu bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleran terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan menimbulkan adanya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik. Hasil akhirnya adalah manusia yang mampu mengenal dirinya, dalam bahasa UU No. 2 Th. 1989 adalah **manusia yang berkepribadian yang mantap dan mandiri**. Manusia yang utuh yang memiliki kemantapan emosional dan intelektual, yang mengenal dirinya, yang dapat mengendalikan dirinya, yang konsisten dan yang memiliki rasa empati (*tepo sliro*), atau dalam kamus psikologi disebut memiliki "*Emotional Intelligence*". Inilah kurang lebih makna "*learning to be*", yaitu muara akhir dari tiga pilar belajar. Pendidikan yang berlangsung selama ini pada umumnya tidak mampu membantu peserta didik (pelajar/ mahasiswa) mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri atau manusia yang utuh karena proses pembelajaran pada berbagai pilar tidak pernah sampai kepada tingkatan "*joy of discovery*" pada pilar "*learning to know*", tingkatan *joy of being succesful in achieving objective*, pada "*learning to do*", dan tingkatan *joy of getting together to achieve common goal*.

Evaluasi sebagai Media Pendidikan dan Sarana Umpan Balik

Hampir tidak ada orang yang menolak bahwa diselenggarakannya suatu sistem pendidikan adalah dapat dihasilkannya manusia terdidik yang dewasa secara intelektual, moral, kepribadian, dan kemampuan. Namun yang sering disoroti orang seperti yang akhir-akhir ini berlangsung adalah dimensi **penguasaan pengetahuan peserta didik** yang belum tentu berdampak kepada pengembangan kemampuan intelektual, kematangan pribadi, kematangan moral dan karakter.

Adalah keyakinan profesional dan akademik bahwa sistem evaluasi yang diterapkan akan menentukan keberhasilan kita mencapai tujuan pendidikan nasional. Evaluasi pendidikan yang berupa evaluasi hasil belajar yang dilakukan pada akhir jenjang satuan pendidikan seperti UAN (Ujian Akhir Nasional) tidak dapat diharapkan dapat berdampak terhadap efektifitas tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tidak lain karena menurut hasil penelitian Benyamin Bloom tingkah laku belajar peserta didik akan dipengaruhi oleh perkiraan peserta didik tentang apa yang akan diujikan. Dengan demikian kalau yang akan diujikan adalah penguasaan pengetahuan yang telah dihafal, dengan sendirinya peserta

didik hanya akan belajar menguasai materi yang akan diujikan. Akibatnya peserta didik akan mengabaikan berbagai kegiatan belajar yang tidak akan diujikan, seperti belajar meneliti, belajar menulis makalah, belajar mengapresiasi karya sastra, belajar berdemokrasi dan berbagai proses belajar yang bermakna transformasi budaya. Agar peserta didik sejak memasuki suatu jenjang pendidikan secara terus menerus dan intensif melakukan proses pembelajaran yang bermakna bagi tercapainya berbagai tujuan pendidikan, perlu dikembangkan dan dilaksanakan evaluasi secara komprehensif, terus-menerus dan obyektif. Evaluasi yang demikian hanya dapat dilakukan oleh seorang guru yang profesional yang mampu merencanakan, mengelola, memotivasi, dan menilai proses pembelajaran yang berlangsung dari hari ke hari. Evaluasi semacam ini hakekatnya merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri, yang berfungsi sebagai bagian dari strategi penguatan "*reinforcement strategy*" atau dalam bahasa teknis kurikulum disebut sebagai salah satu wujud dari "*hidden curriculum*". Masalah evaluasi semacam inilah yang perlu dilaksanakan dalam suatu pendidikan yang mendudukkan "*classroom as social system*" (Parson), dan sekolah sebagai pusat sosialisasi/pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap (Inkoles).

Model evaluasi yang merupakan bagian dari strategi pembelajaran ini dari sudut pandang teori belajar sosial (*social learning theory*) akan dapat menumbuhkan sikap dan kemampuan yang diharapkan, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, belajar secara terus menerus, dan yang sukar untuk dikembangkan melalui model evaluasi hasil belajar yang tradisional yang dilakukan pada akhir satuan jenjang atau kelas seperti "ulangan umum" pada akhir semester dan hasilnya, tanpa dipengaruhi hasil dan kegiatan belajar harian dimasukkan ke dalam rapot atau Ujian Akhir Nasional (UAN) yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan dan hasilnya menentukan kelulusan seseorang. Model terakhir ini dari sudut pandang teori belajar sosial, dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya.

Untuk kepentingan pengelolaan pendidikan secara nasional disadari perlunya secara periodic diadakan evaluasi hasil belajar tingkat nasional atau lebih tepat disebut "Nasional Assesment". Fungsinya sebagai bagian dari manajemen pendidikan secara nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang peta mutu pendidikan nasional sebagai alat umpan balik guna mendiagnosis faktor-faktor penyebab dari keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu sekolah atau daerah dalam membantu peserta didik dalam mencapai tingkatan hasil belajar yang diharapkan. Kegiatan semacam ini sangat penting dan bermakna bila dimanfaatkan untuk melakukan tindak lanjut berupa upaya perbaikan, pembaharuan, dan berbagai kegiatan untuk meratakan mutu pendidikan nasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua model evaluasi yang diuraikan dalam makalah ini adalah yang secara langsung terkait dengan

kurikulum dan proses pembelajaran. Disamping itu kita mengenal dua lainnya, jenis evaluasi konteks, dan evaluasi masukan yang secara menyeluruh perlu dilakukan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Peranan Guru dan Implikasinya terhadap Profesionalisasi Jabatan Guru

Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah kependidikan yang secara akademik dan profesional dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung oleh penerapan model evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan, **hanya akan secara efisien dan efektif mendukung terlaksananya fungsi pendidikan sebagai proses pembudayaan dan tercapainya tujuan pendidikan, bila dilaksanakan oleh guru yang memiliki kemampuan profesional.** Jabatan profesional sebagai yang secara universal diakui adalah jabatan yang memerlukan pendidikan lanjutan dan pelatihan khusus (*advanced education and special training*). Tidak lain karena jabatan profesional adalah jabatan yang memerlukan kemampuan merencanakan, kemampuan mengelola, kemampuan mengendalikan, kemampuan memonitor, kemampuan menilai, dan kemampuan mendiagnosis. Untuk guru yang berderajat profesional disamping kemampuan-kemampuan tersebut, diperlukan tambahan kemampuan memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang didasarkan atas pemahamannya atas peserta didik, penguasaannya atas ilmu pengetahuan sebagai bahan ajar, dan teknologi pendidikan (didaktik, metodik, dan paedagogik).

Dengan demikian jelas betapa tingginya tuntutan profesionalitas seorang guru profesional. Untuk itu James B. Conant sebagai bagian dari reformasi pendidikan di Amerika Serikat akibat dari ketertinggalan Amerika Serikat dalam teknologi ruang angkasa mensyaratkan calon guru haruslah mereka (lulusan SMA) yang berada pada peringkat 20% keatas.

Untuk memenuhi tuntutan profesional ini dalam mencoba untuk membahas masalah Guru dan pendidikannya, ISPI perlu membahas dan menentukan hal-hal berikut :

- (1) standar profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- (2) hierarki profesional kependidikan;
- (3) persyaratan pendidikan pra-jabatan profesional tenaga pendidik berderajat profesional;
- (4) standar pendidikan profesional tenaga kependidikan;
- (5) sertifikasi profesional tenaga kependidikan.

Demikianlah beberapa pemikiran untuk dibahas sebagai upaya menyusun rekomendasi bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

Catatan kaki

- 1) Philip Phenix, *Realms of Meaning a Philosophy of The Curriculum For General Education*, (1964) New York, Mc. Graw Hill Book Co., hal 10
- 2) Ibid. hal 6 – 7
- 3) Jacques Delors et. Al., *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of The International Commision on The Twenty First Century, (1996), Paris, UNESCO
- 4) Whitehead, A.N., *The Aims of Education and Other Essays* (1957) New York, the New American Library, hal 16
- 5) Ibid. hal. 13
- 6) Ibid. hal. 14
- 7) Philip H. Phenix, *Realms of Meaning : A Philosophy of The Curriculum for General education*, (1964), New York, Mc. Graw Hill Book
*) Baca Tulisan Soedijarto, "Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memajukan Kebudayaan Nasional Melalui Sekolah Sebagai Pusat Pembudayaan. Makalah Prakongres Kebudayaan di Bali, 28 April 2003
- 9) Jacques Delors, et. Al., Ibid Hal. 193
- 10) Jacques Delors, et. Al., Ibid. Hal. 193
- 11) Israel Scheffler, "*Reflection on Educational Relevance*", dalam buku *Curriculum : Readings in the Philosophy of Education* (1971), Martin Levit, Edit, Urbana, University of Illinois Press. Hal. 112
- 12) Ibid., hal. 117
- 13) Ibid., hal. 113 – 114
- 14) Ibid., hal. 113 – 114
- 15) Israel Scheffler, Ibid. hal. 112
- 16) Jaques Delors et. Al., Op. cit, hal. 92